

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR (PSBB) TERHADAP KEBAHAGIAAN PARA PELAKU
USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**FEBBY LAWESKY
07011281722068**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) TERHADAP KEBAHAGIAAN PARA PELAKU USAHA
MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

FEBBY LAWESKY

07011281722068

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002**



20 Juli 2022

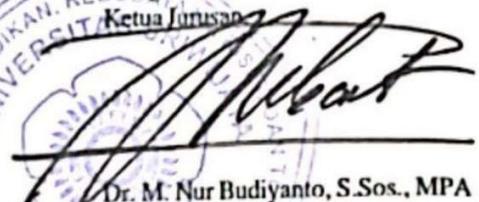
Pembimbing II

**Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009**

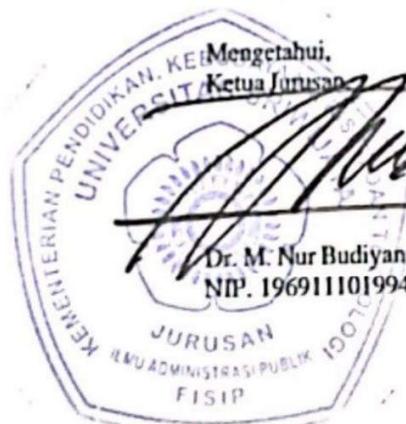


13 November 2022

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Kebahagiaan Para Pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Skripsi
Oleh:

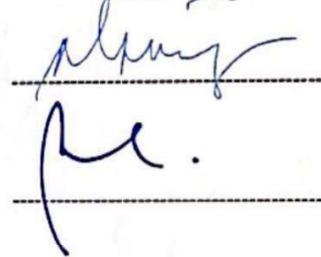
Febby Lawesky
NIM. 07011281722068

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 27 Desember 2022

Pembimbing :

1. Dr. Alamsyah, S. IP., M.Si
NIP. 197808182009121003
2. Junaidi S. IP., M.Si
NIP. 19760309 200802 1 009

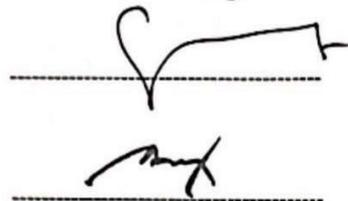
Tanda Tangan



Penguji :

3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002
4. Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfritri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febby Lawesky
NIM : 07011281722068
Tempat dan Tanggal Lahir : Baturaja, 27 Februari 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik/Kebijakan Publik
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Kebahagiaan Para Pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, November 2022
Yang membuat pernyataan,



Febby Lawesky
NIM. 07011281722068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa bertakwa kepada *Allah* maka *Dia* akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada *Allah* maka cukuplah *Allah* baginya, Sesungguhnya *Allah* melaksanakan kehendak-*Nya*, *Dia* telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

(QS Ath-Thalaq 2-3)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

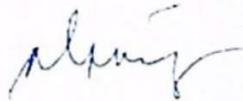
1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Eddy Cawarman dan Ibu Yuliana Marlina
2. Suami Saya, M. Yossa Edra
3. Sahabat Seperjuangan Saya
4. Almamater Kebanggaan Saya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap kebahagiaan Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan menggunakan teori kebahagiaan dari Bruno Frey (2008). Teori tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu pendapatan, karakteristik individu, dan kondisi perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB yang dilaksanakan di Kota Palembang memberikan dampak negatif terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yaitu membuat pendapatan/penghasilan mereka menurun, penjualan sedikit, kehilangan tenaga kerja, tidak ada peluang untuk membuka usaha lain, serta tidak adanya bantuan dari pemerintah yang membuat para pelaku UMKM semakin kesulitan. Perubahan kondisi ekonomi ini menyebabkan para pelaku UMKM cenderung kurang bahagia. Hasil penelitian ini merekomendasikan hendaknya pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan dampak lain yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB tersebut. Serta pemerintah hendaknya memberi bantuan ataupun melakukan program pemberdayaan usaha sebagai upaya pemulihan perekonomian UMKM agar bisa tetap bertahan dan tidak gulung tikar.

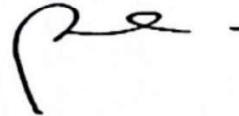
Kata kunci: Covid-19, corona, implementasi, protokol kesehatan

Pembimbing I



Dr. Alamsyah, S.IP., M.S
NIP. 197808182009121002

Pembimbing 2



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Indralaya, September 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Sriwijaya



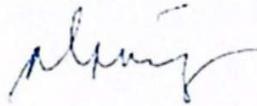
Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 199611101994011001

ABSTRACT

This study aims to identify the impact of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies on the happiness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Ilir Barat I District, Palembang City by using the happiness theory of Bruno Frey (2008). The theory consists of three aspects, namely income, individual characteristics, and economic conditions. This study uses qualitative research methods with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Based on the results of interviews and observations made that the implementation of the PSBB policy implemented in Palembang City had a negative impact on MSME actors in Ilir Barat I District, Palembang City, namely making their income / income decrease, sales were few, lost labor, there was no opportunity to open other businesses, as well as the absence of assistance from the government which makes it more difficult for MSME actors. This change in economic conditions causes MSME actors to tend to be less happy. The results of this study recommend that the government should pay attention to and consider other impacts caused by the PSBB policy. And the government should provide assistance or carry out business empowerment programs as an effort to restore the MSME economy so that they can survive and not go out of business.

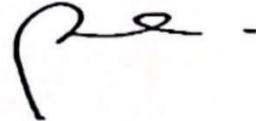
Keywords: Covid-19, corona, implementation, health protocol

Pembimbing I



Dr. Alamsyah, S.IP., M.S
NIP. 197808182009121002

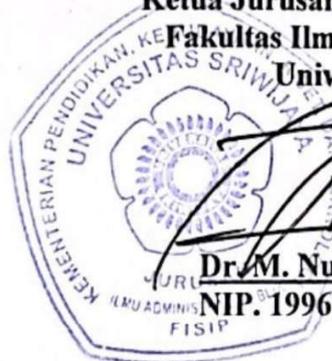
Pembimbing 2



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Indralaya, September 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 199611101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur teramat dalam untuk Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Kebahagiaan Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”. Disusunnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Peneliti mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dalam skripsi ini peneliti meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini dapat jauh lebih baik kedepannya. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA sebagai ketua jurusan ilmu administrasi publik, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si sebagai dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Junaidi. S.IP., M.Si sebagai dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan tata usaha (TU) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya kampus Indralaya
7. Teman teman yang selama ini memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Trimakasih juga kepada semua pihak yang ikut andil membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Inderalaya, November
2020

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR LAMPIRAN	VI
DAFTAR SINGKATAN.....	VII
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II	14
A. Landasan Teori	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Evaluasi Dampak Kebijakan.....	14
B. Pengertian Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).....	16
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
D. Teori Kebahagiaan.....	17
1. Konsep Kebahagiaan	20
2. Kebahagiaan dan Kebijakan Publik.....	22
3. Teori yang digunakan	23
E. Kerangka Pemikiran	24
F. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Definisi Konsep	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Informan Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36

G. Teknik Analisis Data	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB IV	41
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang...	41
B. Karakteristik Informan Penelitian	45
C. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang.....	46
D. Hasil Penelitian.....	46
E. Pembahasan	60
BAB V	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah UMKM per Gender Kota Palembang Tahun 2021	8
Tabel 2. Jumlah UMKM di Kota Palembang berdasarkan Lapangan Usaha	9
Tabel 3. Jumlah UMKM di Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020	9
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 5. Fokus Penelitian	34
Tabel 6. Data Informan Penelitian	45
Tabel 7. Variabel dan Indikator Karakteristik Individu	53
Tabel 8. Variabel dan Indikator Kondisi Perekonomian	56
Tabel 9. Tabel Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kasus Covid-19 di Kota Palembang.....	7
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	25
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman.....	37
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang	44
Gambar 5. Teori Kebahagiaan.....	47
Gambar 6. Kebahagiaan dipengaruhi Pendapatan.....	49
Gambar 7. Kebahagiaan dipengaruhi Karakteristik Individu.....	52
Gambar 8. Kebahagiaan dipengaruhi Kondisi Perekonomian UMKM.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	76
Lampiran 2 Lembar Revisi Seminar Proposal.....	77
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	78
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	79
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	80
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	84
Lampiran 7 Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	85
Lampiran 8 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 9 Perwako Palembang Nomor 14 Tahun 2020	87
Lampiran 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020.....	88
Lampiran 11 Hasil Wawancara Informan	89
Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian	99

DAFTAR SINGKATAN

PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
UMKM	: Usaha Micro Kecil dan Menengah
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
MSMEs	: <i>Micro, Small and Medium Enterprises</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, keberadaan Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian bagi negeri. Terlihat dari peran Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan nasional. Pendefinisian UMKM diatur menurut (UU No. 20 Tahun 2008), dimana yang disebut Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut: (1) Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00; (2) Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan Rp.300.000.000,00 s.d Rp.2,5 miliar; dan (3) Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,00 s.d Rp.10 miliar atau hasil penjualan tahunan Rp.2,5 miliar s.d Rp.50 miliar.”

Dalam (UU No. 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam sektor ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dikutip dari Kompas.com berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), hingga 2018 ada 116,97 juta orang atau 98 persen tenaga kerja yang berkegiatan di sektor ini.

Selain dari sisi penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menyumbang Rp 8.573,9 triliun atau 61,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (atas harga berlaku) per 2018. Menurut Agus & Putera, (2017) “Kekuatan Usaha Kecil Menengah (UKM) apabila dilihat dari faktor ekonomi (bisnis) adalah : a)

mengandalkan sumber keuangan informal yang mudah diperoleh, b) mengandalkan bahan-bahan baku lokal (tergantung pada jenis produk yang dibuat), c) melayani segmen pasar bawah yang tinggi permintaan (proposisi dan populasi paling besar).” Inilah menjadi salah satu alasan mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kekuatan besar bagi sektor ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan peran sebesar itu, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun harus dijaga dan dikembangkan agar semakin berdaya.

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, merupakan salah satu tujuan dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan atas dasar hak asasi manusia dan kesetaraan untuk menghapus kemiskinan dan mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah disepakati oleh 193 negara pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Ini adalah agenda pembangunan global yang mencakup 17 tujuan, 169 pencapaian dan 241 indikator. Indikator ini akan digunakan sebagai kebijakan dan dana untuk 10 tahun ke depan. dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. Ini adalah 17 tujuan, 169 tujuan, 241 indikator dan 4 pilar rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. (Yuliana, 2020)

Wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terkena dampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* demi memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah.

Terkait hal tersebut pemerintah kota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Palembang, disebutkan pada (Walikota Palembang, 2020b) ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Berhubungan dengan pembatasan kegiatan atau aktivitas Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), tertulis dalam peraturan (Walikota Palembang, 2020b) pasal 10 Ayat (3) “Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk: a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar (*delivery*), b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan”, dan menerapkan protokol kesehatan lainnya yang berhubungan dengan penularan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19). Dan Pasal 14 Ayat (3) bagian (a) menyebutkan “pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan dengan mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar”.

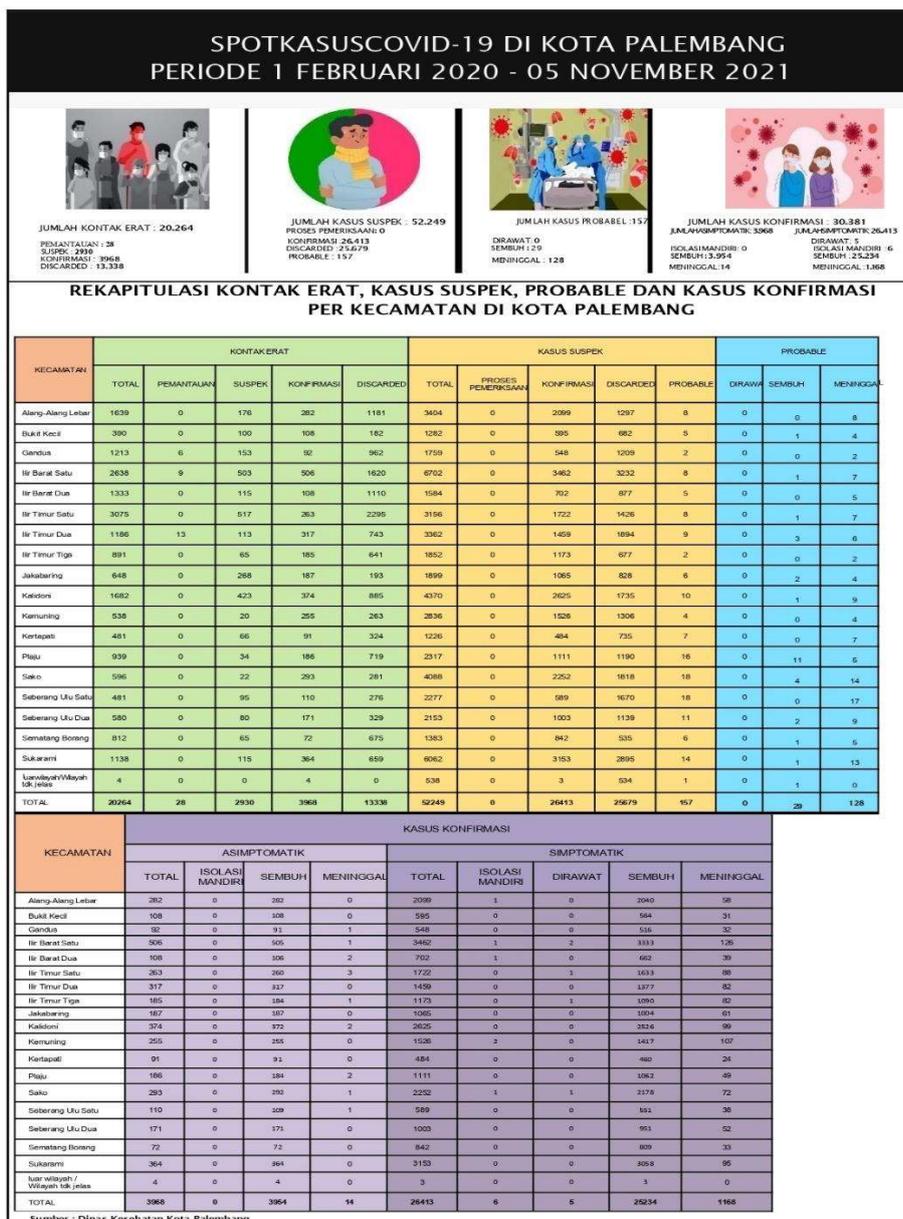
Hal ini menjadikan ancaman penurunan pendapatan bagi pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) karena *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat orang takut untuk datang langsung maupun membeli bahan kebutuhan dan makanan/minuman dari luar sehingga mengakibatkan pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya melayani konsumen dengan jumlah yang sedikit.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Palembang telah dilakukan dua kali. Pertama pada tanggal 20 Mei-2 Juni dan dilanjutkan PSBB tahap kedua pada tanggal 3-16 Juni 2020, hal ini karna pada tahap pertama PSBB diterapkan tidak berdampak signifikan untuk menekan angka *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* di Palembang, jumlah pasien positif di Sumsel pada hari Senin (1/6/2020) mencapai hampir menyentuh angka 1.000 orang. Peningkatan jumlah pasien terpapar *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* terbaru ini, disumbangkan dari warga Kota Palembang sebanyak 13 orang. Lonjakan kasus *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* lantaran aktivitas yang kembali dibuka setelah pasca selesainya diberlakukan PSBB di kota Palembang. Setelah PSBB dihentikan, protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat mulai kendur, sehingga penularan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* terus terjadi. (Inge, 2020)

Maka dari itu pemerintah kota Palembang dalam hal ini walikota Palembang mengeluarkan kembali instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang mengintruksikan Peningkatan Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Penularan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* di Kota Palembang, tertuang dalam poin keempat dalam (W. Palembang, 2020) disebutkan kepada perusahaan dan pelaku usaha untuk mewajibkan karyawannya menggunakan masker selama beraktifitas, membatasi operasional kegiatan usaha dan karyawan yang menyebabkan pertemuan dengan melakukan *Work From Home (WFH)*, *Shif* kerja dan/atau jaga jarak aman (*physical distancing*) bagi karyawan sesuai protokol kesehatan, serta agar melakukan pembersihan lingkungan dengan melakukan disinfeksi cuci tangan dan pelayanan diutamakan pada pesan antar (*delivery*) dan bawa pulang (*take away*), namun apabila tetap menerima pengunjung atau makan/minum di tempat bagi pengelola rumah makan/restoran, maka pemilik/ pengelola berkewajiban mengatur pembatasan jumlah pengunjung disesuaikan kapasitas tempat yang memberi batas jarak aman (*physical distancing*) antar pengunjung.

PSBB tahap kedua ini lebih menekan pada penegakan protokol kesehatan di masyarakat dan persiapan *new normal*. Walaupun telah melaksanakan PSBB tahap kedua, angka kasus *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) di Palembang tetap melonjak, catatan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Sumatera Selatan, jumlah kasus konfirmasi positif di Sumsel mencapai 1.448 orang, pada Senin (15/6/2020). Dari jumlah tersebut 882 orang berasal dari Palembang. (A. Y. Putra, 2020). Berdasarkan situs website (Dinkes Palembang, 2021) di akses pada tanggal 8 November 2021 data Covid-19 di Kecamatan Ilir Barat I mencapai 3.968 kasus konfirmasi positif Covid-19. Adapun data Covid-19 di Kota Palembang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kasus Covid-19 di Kota Palembang



Gambar diatas menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Palembang. Data tersebut didapatkan dari halaman website resmi Dinas Kesehatan Kota Palembang periode 1 Febuari 2020 – 5 November 2021. Data menunjukkan pada Kecamatan Iir Barat I menyumbang paling banyak jumlah kasus positif Covid-19 dibanding kecamatan lainnya, dengan jumlah kasus postifi Covid-19 sebanyak 506 dengan kasus asimtomatik (tanpa gejala) dan 3.462 dengan kasus simtomatik (dengan gejala).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak hampir keseluruhan sector terutama sUsaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia, juga dialami di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Kota Palembang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, data jumlah UMKM per Gender Kota Palembang sebanyak 101.903 UMKM dengan total 18 Kecamatan. Data ini merupakan data pada tahun 2021, untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah UMKM per Gender Kota Palembang Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Iilir Barat I	1.713	2.695
2	Iilir Barat II	1.875	2.753
3	Seberang Ulu I	5.562	6.361
4	Seberang Ulu II	3.637	4.955
5	Plaju	1.969	3.408
6	Kertapati	3.908	4.443
7	Sematang Borang	907	1.504
8	Bukit Kecil	2.264	2.420
9	Kemuning	1.429	2.141
10	Iilir Timur I	1.125	1.741
11	Iilir Timur II	2.088	3.782
12	Iilir Timur III	2.040	2.834
13	Kalidoni	947	2.224
14	Sukarami	2.708	4.212
15	Sako	1.482	2.486
16	Alang-alang Lebar	1.532	2.937
17	Gandus	2.587	3.711
18	Jakabaring	4.674	4.849
Total		101.903	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (diolah), 2021

Untuk menyederhakan data diatas, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, jumlah UMKM Kota Palembang berdasarkan Lapangan Usaha adalah 155.465 UMKM dengan total 15 jenis lapangan usaha, didominasi oleh jenis lapangan usaha yakni Jasa yang berjumlah 126.605 UMKM. Data ini merupakan data pada tahun 2021, untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah UMKM di Kota Palembang berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Jumlah UMKM	Ket
1	Pertambangan dan Penggalian	4	2021
2	Industri Pengolahan	741	2021
3	Pengadaan Listrik dan Gas	2.345	2021
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.437	2021
5	Konstruksi dan Buruh	1.157	2021
6	Perdag Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.646	2021
7	Transportasi dan Pergudangan	6.671	2021
8	Penyediaan Akom, dan Makan Minum	6.850	2021
9	Informasi dan Komunikasi	8	2021
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	54	2021
11	Real Estate	4	2021
12	Jasa Perusahaan	2.601	2021
13	Jasa Pendidikan	281	2021
14	Jasa Kesehatan	61	2021
15	Jasa Lainnya	126.605	2021
	Total	155.465	

Sumber : *umkm.depkop.go.id (diolah), 2021*

Pesebaran UMKM di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini. berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, jumlah UMKM di Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan Lapangan Usaha adalah 112 UMKM dengan total 4 jenis lapangan usaha, didominasi oleh jenis lapangan usaha yakni pedagang besar dan eceran berjumlah 73 UMKM. Data ini merupakan data pada tahun 2020, untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah UMKM di Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	Jumlah UMKM	Ket
1	Industri Pengolahan	8	2020
2	Perdag Besar & Eceran	73	2020
3	Penyediaan Makan & Minum	22	2020
4	Jasa Lainnya	9	2020
	Total	112	

Sumber : *Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (diolah), 2021*

Pada penetapan kebijakan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi dua kriteria: Pertama, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Berdasarkan fakta data kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Palembang, Kota Palembang memberlakukan kebijakan PSBB dua tahap. Kasus konfirmasi positif Covid-19 Kecamatan Ilir Barat I pada Gambar 1.1 mencapai 3.968 kasus, kecamatan ini menyumbang paling banyak kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Palembang, dan berdasarkan pengamatan peneliti serta jumlah data UMKM yang tersebar di lokasi penelitian di Kecamatan Ilir Barat I cukup banyak. Maka inilah yang menjadi alasan untuk memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, penelitian ini nantinya akan mengetahui dampak diberlakukan kebijakan PSBB di wilayah tersebut bagi UMKM yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang dialami oleh pelaku UMKM, dimana terjadi perubahan pada proses kegiatan ekonomi mereka dalam upaya melayani pembeli serta perubahan dalam rutinitas persaingan usaha mereka.

Kebijakan PSBB memberikan dampak bagi para pelaku UMKM di Kota Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Barat I, karena adanya PSBB maka jam operasional UMKM akan berkurang dan akibatnya UMKM hanya melayani konsumen dengan jumlah yang sedikit. Akibatnya pendapatan UMKM akan menurun dikarenakan hanya melakukan sedikit transaksi sehingga UMKM terancam bangkrut. Dampak berkurangnya atau hilangnya pendapatan bisa memicu faktor penentu kebahagiaan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam penelitian sebelumnya (G. B. Putra, 83:2019). “Orang dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai apa pun yang mereka inginkan, khususnya mereka dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Penghasilan yang lebih tinggi mungkin menyebabkan orang lebih bahagia dan orang yang lebih bahagia juga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. *Gardner dan Oswald (2001)* menemukan

bahwa pemenang lotere di Inggris sebesar £ 50.000 mengungkapkan kebahagiaan yang lebih tinggi dengan standar deviasi antara 0,1 sampai 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi memang menyebabkan orang menjadi lebih bahagia.”

Fenomena hubungan antara Covid-19, kebijakan PSBB, dan sektor UMKM sudah mendapatkan perhatian dari para peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti menemukan bahwa kebijakan PSBB menimbulkan beberapa indikasi dampak terhadap UMKM. Indikasi dampak ekonomi antara lain penurunan pendapatan (Fathoni 2019; Suryani 2021), penurunan penjualan, bahan baku, hambatan produksi, permodalan (Aminy 2020; Amri 2020) yang dapat memicu kebangkrutan (Thaha 2020). Sebagian peneliti berusaha memetakan strategi bertahan UMKM (Hardilawati 2020) dampak Covid-19 dan strategi jangka panjang dan pendek bagi UMKM (Pakpahan 2020), efek pandemic Covid-19 terhadap UMKM (Hardiwardoyo 2020), jaminan hak UMKM pada masa PSBB (Said 2020). Dan indikasi dampak sosial-ekonomi memberikan dampak positif dan negatif di masa pandemi Covid-19 (Torrido 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tentang dampak kebijakan PSBB terhadap UMKM dan masih terfokus pada aspek ekonomi dan belum ada yang berusaha menghubungkannya dengan kebahagiaan para pelaku UMKM.

Hakikat tujuan Negara (satu kesatuan antara pemerintah, rakyat, wilayah, seperangkat hukum dan peraturan, dan pengakuan Negara lain) adalah untuk kesejahteraan dan keamanan. Hadirnya kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan/kebahagiaan masyarakat. Hubungan antara kebijakan publik dan kebahagiaan berkaitan karena dilihat dari salah satu tujuan dari kebijakan publik tersebut. Maka dari itu penelitian ini nantinya akan berkaitan dengan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan PSBB dengan fokus

penelitian kebahagiaan menggunakan teori kebahagiaan oleh Frey dengan dimensi pendapatan, karakteristik individu (*sosiodemografi*), serta kondisi perekonomian. Dengan indikator tersebut nantinya nantinya akan mengetahui kebahagiaan UMKM di Kecamatan Ilir Barat I akibat dampak dari penerapan kebijakan PSBB di Kota Palembang.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena kebahagiaan merupakan hak yang penting bagi setiap individu atau kelompok. Tingkat kebahagiaan pada setiap individu/kelompok berbeda-beda tergantung kebutuhan individu/kelompok tersebut. Ada banyak faktor-faktor penentu kebahagiaan individu/kelompok misalnya kebahagiaan individu/kelompok dilihat dari sudut pandang kondisi ekonomi atau pekerjaan, pekerjaan merupakan salah satu faktor untuk memperoleh kebahagiaan, karena dengan bekerja individu/kelompok bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan ketika penghasilan mereka berkurang atau hilang otomatis mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana dampak kebijakan PSBB terhadap para pelaku UMKM yang mengalami berkurangnya atau hilangnya pendapatan akibat kebijakan PSBB tersebut, yang akan dikaitkan dengan kebahagiaan para pelaku UMKM dilihat dari sudut pandang ekonomi/pendapatannya. Maka akan dilakukan penelitian dengan judul Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Kebahagiaan Para Pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, menggunakan teori kebahagiaan (Frey, 2008) yang menggambarkan kebahagiaan seseorang merujuk pada tiga hal dasar yaitu pendapatan, karakteristik individu (*sosiodemografi*), serta kondisi perekonomian.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi studi bersama bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, dan pemerintah lebih peka terhadap dampak kebijakan yang dirumuskan, sehingga lebih matang dalam mempertimbangkan risiko dan kebijakan tindak lanjut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak kebijakan PSBB terhadap kebahagiaan para pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap kebahagiaan para pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan menambah informasi mengenai analisa dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan perkembangan Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan studi kajian analisis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan bagi pemerintah dan instansi pelaksana kebijakan ini untuk dapat meningkatkan kebijakan kedepannya dan mencapai hasil yang diinginkan, serta menjadi bahan studi bagi pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agus, B., & Putera, E. (2017). *Manajemen Koperasi dan Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan, Teori dan Praktek*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kendiri.
- Davin, S. A., Boniwell, I., & Ayers, A. (2013). *The Oxford Handbook Of Happiness*. Oxford University Press.
- Johns, H., & Ormerod, P. (2007). *Happiness, Economics and Public Policy*. The Institute of Economic Affairs.
- Ng, Y.-K., & Ho, L. S. (2006). *Happiness and Public Policy*. Palgrave Macmillan.
- Sarmadi, S. (2018). *Psikologi Positif*. Penerbit Titah Surga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Gorontalo Press.

ARTIKEL,JURNAL,SKRIPSI/THESIS

- Aminy, A., & Fithriasari, K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM di Jawa Timur. *Seminar Nasioal Official Statistic, 2020(1)*, 15–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.646>
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand, 2(1)*, 123–130. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Aryogi, I., & Wulansari, D. (2016). Subjective Well-being Individu dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 01(1)*, 1–12.
- Damongilala, S., Opod, H., & Sinolungan, J. S. V. (2014). Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Kebahagiaan Keluarga dalam Masyarakat Desa Betelen 1. *Jurnal e-Biomedik (eBM), 2(2)*, 467–470.
- Fathoni, A. (2020). Dampak Covid 19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, 3(1)*, 1–69.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship, 2*, 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 The. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika, 10(1)*, 90–98. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Pakpahan, A. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 20(2020)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Putra, G. B. (2019). Faktor Penentu Kebahagiaan Sesuai Dengan Kearifan Lokal di Bali. *E-*

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8(1), 79–94.

- Rahayu, T. (2016). Determinan kebahagiaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 149–170.
- Said, M. R. (2020). Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 107–114. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15495>
- Suryani, E. (2021). Analisis Dampak Covid-19 terhadap UMKM (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1591–1596.
- Thaha, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Torrado, A. (2021). Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 77–90.
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>

INTERNET/HALAMAN WEBSITE

- Dinkes Palembang. (2021). *Data Covid-19 Kota Palembang*. <http://dinkes.palembang.go.id>
- Inge, N. (2020). *Puncak Kasus Covid-19 di Palembang Diprediksi Terjadi Pada Bulan Juni 2020*. Liputan 6.
<https://m.liputan6.com/regional/read/4268229/puncak-kasus-covid-19-di-palembang-diprediksi-terjadi-pada-bulan-juni-2020>
- Kemenkop UKM. (2021). *Data Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kemenkop UKM. <http://umkm.deskop.go.id>
- Putra, A. Y. (2020). *Jumlah Kasus Covid-19 di Sumsel Bertambah, 52 Orang Positif Corona*. Kompas.com.
<https://regional.kompas.com/read/2020/06/15/19531611/jumlah-kasus-covid-19-di-sumsel-bertambah-52-orang-positif-corona>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *UU NO. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *PP RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Walikota Palembang. (2020a). *Instruksi Walikota Palembang No.1 Tahun 2020*.
- Walikota Palembang. (2020b). *Perwako Palembang Nomor 14 Tahun 2020*.